

**PENTINGNYA PERATURAN DAERAH  
BIDANG PERPUSTAKAAN  
DI KOTA MALANG :  
PENDEKATAN ASPEK SOSIOLOGIS DAN ASPEK  
TEORITIS**

Oleh:

**Drs. Darmono, M.Si**  
Universitas Negeri Malang

Makalah

Disampaikan Pada Penyusunan Raperda Perpustakaan di Kota Malang  
Tgl 17 Nopember 2016  
Di Perpustakaan Umum Kota Malang

**Nopember – 2016**

**PENTINGNYA PERATURAN DAERAH BIDANG PERPUSTAKAAN  
DI KOTA MALANG  
PENDEKATAN ASPEK SOSIOLOGIS DAN ASPEK TEORITIS**

Oleh: Darmono  
Pustakawan Universitas Negeri Malang

Disampaikan Pada Penyusunan Raperda Perpustakaan di Kota Malang  
Tgl 17 Nopember 2016

**Abstrak:** Keberadaan perpustakaan menjadi keniscayaan dalam masyarakat yang berbudaya, baik sebagai titik tolak ataupun prasyarat terjadinya proses, maupun sebagai hasil atau wujud dari proses pembudayaan. Adalah kewajiban Pemerintah Kota Malang untuk membudayakan warganya, sekaligus mendukung peningkatan kebudayaan itu secara berkelanjutan; sehingga adalah juga kewajiban Pemerintah Kota Malang untuk menjamin adanya perpustakaan. Hal ini antara lain dapat diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur perpustakaan. Ditengah arus globalisasi yang tidak bisa kita bendung, keberadaan perpustakaan merupakan keniscayaan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat Kota Malang yang literat. Masyarakat yang literat adalah masyarakat yang sadar tentang pentingnya arti informasi, menghargai informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya.

**A. Pendekatan Ranah Sosiologis terhadap Perpustakaan**

Perpustakaan keberadaanya tidak bisa dipisahkan dari tatanan masyarakat. Dengan pendekatan sosiologi, dalam tatanan masyarakat dikenal istilah institusi dan sistem. Perpustakaan dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam wilayah yang luas (negara Indonesia). Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpolat dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumberdaya yang adalah struktur sosial tadi.

Dengan demikian perpustakaan adalah sistem sosial yang mengandung di dalamnya interaksi antar berbagai pihak yang terus menerus. Untuk melakukan interaksi ini diperlukan kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan/wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Perpustakaan memerlukan legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya bagi kehidupan bersama di

masyarakat. Cara masyarakat menetapkan serta menerapkan norma-norma tentang perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi perpustakaan di kalangan masyarakat. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Legitimasi dan dominasi ini bersama-sama dengan tata-cara pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan membentuk "struktur sosial perpustakaan umum".

Dalam tinjauan sosiologis hal ini dikenal dengan pandangan konstruktivis, yakni pandangan yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membangun (mengkonstruksi) realitas kehidupan lewat kemampuan berpikirnya, dan bahwa semua institusi atau sistem yang ada di dalam sebuah masyarakat adalah hasil konstruksi di dalam pikiran manusia. Teori sosiologi yang paling terkenal untuk pandangan konstruktivis ini adalah teori Strukturasi dari Giddens (1984).

Dengan memakai teori strukturisasi di atas, perpustakaan sebagai sebuah institusi sosial memperlihatkan adanya dimensi, sebagai berikut:

a. Dimensi interaksi antar berbagai pihak

Perpustakaan tidak akan ada tanpa interaksi antar berbagai komponen di dalam masyarakat. Dalam hal perpustakaan umum, maka keseluruhan proses transfer pengetahuan yang dilakukan oleh peminjaman buku, dapat dilihat sebagai proses interaksi yang melibatkan berbagai pihak, baik pihak administrasi maupun pihak pengelola perpustakaan. Interaksi dalam proses layanan perpustakaan dan proses bermasyarakat yang lebih umum ini mencakup pula komunikasi yang diperantarai melalui berbagai bacaan, buku, surat kabar dan sebagainya, yang antara lain tersedia di perpustakaan. Untuk melihat perpustakaan sebagai institusi sosial, dapat diperhatikan bagaimana perpustakaan dan pustakawannya dilibatkan dalam komunikasi layanan perpustakaan sebagai komunikasi sosial, bagaimana hubungan kekuasaan antara berbagai pihak dengan pustakawan, dan sanksi-sanksi sosial apa saja yang berlaku dalam pemanfaatan perpustakaan oleh sebuah masyarakat. Hal-hal inilah yang dapat terlihat sehari-hari dalam kegiatan perpustakaan sebagai sebuah institusi sosial.

b. Dimensi modalitas medium

Setiap kali berbagai pihak terlibat dalam komunikasi layanan perpustakaan diperlukan skema interpretasi yang sama agar komunikasi itu efektif. Dalam komunikasi tadi diperlukan skema interpretasi yang sama agar efektif. Dalam interaksi antar berbagai pihak, fasilitas dan kewenangan ini menentukan apa dan bagaimana setiap pihak yang bersangkutan mencapai tujuan mereka. Alokasi fasilitas dan kewenangan ini menentukan bentuk hubungan kekuasaan (*power relations*) antar berbagai pihak yang berinteraksi, misalnya antara pustakawan masyarakat, pustakawan dengan birokrat, dan pustakawan dengan anggota masyarakat. Kekuasaan ini dapat diartikan luas (kemampuan untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungan sosial), maupun kemampuan dalam arti sempit (dominasi atas satu pihak terhadap pihak lain). Selain soal fasilitas, keseluruhan kegiatan bermasyarakat umum berlangsung dalam kaidah-kaidah yang menentukan mana tindakan yang benar, dan mana tindakan yang salah; mana yang bernilai tinggi mana yang rendah, mana yang bermanfaat mana yang menyesatkan. Dalam kaitannya dengan perpustakaan, maka norma-norma itu mengatur pula kaidah-kaidah kebenaran dalam hal-hal yang dikelola perpustakaan, termasuk pula nilai perpustakaan itu sendiri, dan apa sesungguhnya manfaat perpustakaan dalam pendidikan atau dalam kehidupan sosial.

c. Dimensi struktur

Sebagian besar skema interpretasi yang memungkinkan komunikasi di perpustakaan maupun di masyarakat luas sudah tersedia bagi pihak-pihak yang berinteraksi, misalnya dalam bentuk tata-cara berkomunikasi dan memanfaatkan perpustakaan. Ini semua terkandung dalam seperangkat makna/artian yang diterima bersama. Selain itu, struktur masyarakat maupun sudah mempunyai tata-aturan tentang dominasi serta legitimasi berbagai badan dan unit kerja di dalamnya, termasuk perpustakaan umum. Tata-aturan tentang dominasi dan legitimasi ini tidaklah selalu harus berupa formalitas tertulis. Sangat besar kemungkinannya ada tata-aturan tersebut yang tidak tertera tetapi terpatrit di benak masing-masing pihak yang saling berinteraksi. Harus juga diingat bahwa selain dalam bentuk tata-aturan, perangkat makna, dominasi, dan legitimasi juga adalah sumberdaya yang dipakai.

Artinya, segi struktur dalam model Giddens ini bukanlah sesuatu yang mati atau diam. Struktur ini merupakan pedoman umum, yang pada gilirannya juga dapat diubah-ubah setiap saat melalui perubahan dalam skema interpretasi, alokasi fasilitas, maupun perubahan norma-norma.

Institusi perpustakaan, dengan demikian, adalah keseluruhan hal yang diuraikan di atas, dan yang telah berlangsung dalam waktu lama di berbagai tempat di dalam sebuah entitas kemasyarakatan. Institusi ini tidak hanya "struktur" berupa tata aturan dan sumberdaya, tetapi juga bagaimana pemanfaatan dan bagaimana perubahannya. Jika hendak mengatakan "perpustakaan umum" maka ia adalah sebuah institusi sosial yang di dalamnya mengandung tata-aturan dan sumberdaya berupa semesta makna simbolis, aturan dominasi, dan legitimasi, selain juga skema interpretasi, fasilitas, dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Semua ini dapat berupa formalitas tertulis dalam bentuk undang-undang, peraturan, surat keputusan, dan sebagainya, tetapi dapat juga berupa pemikiran-pemikiran, citra, ingatan kolektif yang ada di masyarakat tentang perpustakaan. Selain dari itu, semua ini kemudian juga diwujudkan --atau terlihat sebagai-- sekumpulan interaksi sosial yang mengandung kegiatan komunikasi antara perpustakaan, pustakawan dengan pemakai dan anggota masyarakat; dalam penggunaan wewenang dan kekuasaan oleh perpustakaan atau oleh lembaga lain terhadap perpustakaan, serta dalam penerapan sanksi-sanksi sosial.

## **B. Perpustakaan Umum Sebagai Simpul Layanan Informasi**

Diharapkan perpustakaan terutama perpustakaan umum mampu berperan sebagai simpul informasi bagi masyarakat dalam menyediakan akses informasi secara memadai, dan murah. Untuk itu perpustakaan perlu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, dan berpihak pada kebutuhan informasi masyarakat. Demokratis dalam arti bahwa perpustakaan diselenggarakan untuk melayani **semua lapisan masyarakat** tanpa memandang berbagai perbedaan seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, status sosial, kepercayaan, dan warna kulit; serta berkeadilan artinya bahwa semua masyarakat perlu mendapat hak yang sama untuk memperoleh layanan perpustakaan baik di perkotaan, pedesaan. Semua lapisan masyarakat perlu mendapat layanan perpustakaan sesuai dengan kebutuhannya, baik yang perkotaan maupun yang dipingiran kota.

Jika hal ini dapat dilaksanakan akan menjadikan perpustakaan bukan saja merupakan sumber informasi bagi masyarakat akan tetapi juga merupakan **identitas komunitas** di dalam masyarakat tersebut. Perpustakaan merupakan suatu tempat untuk mencari arah dan merupakan suatu bagian dari komunitas masyarakat itu. Jika institusi perpustakaan mendapat perhatian dari pemerintah (dalam arti kebijakan dan teknis) serta mendapat perhatian dari masyarakat, maka akan tumbuh keniscayaan bahwa institusi perpustakaan akan menjadi identitas komunitas masyarakat (Darmono, 2006)

Memang tidak mudah untuk mewujudkan kondisi seperti itu, akan tetapi paling tidak kita dapat memulainya. Sudah saatnya pemerintah perlu mengkondisikan kehidupan masyarakat berbasis pada informasi, salah satunya melalui penyediaan informasi di berbagai perpustakaan di lingkungan kehidupan dan di lingkungan sosial masyarakat.

Sangat strategis apabila perpustakaan umum yang ditujukan untuk publik dirancang sebagai ruang publik (*public sphere*) (mengambil istilah Habermas dengan konsep makna yang berbeda yaitu institusi yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara demokratis). Untuk bisa menjamin hal tersebut diperlukan penguatan kelembagaan perpustakaan sebagai institusi publik yang demokratis dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat. Pada kondisi seperti itu perpustakaan bisa dipandang sebagai “lembaga pendidikan non formal” yang bisa berperan untuk menunjang pendidikan sepanjang hayat. Untuk itu perpustakaan harus bisa diakses semua lapisan masyarakat.

Bahwa perpustakaan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat hal ini sejalan dengan prinsip “Manifesto UNESCO Perpustakaan Umum” (Unesco, 1991) maka selayaknya bahwa perpustakaan umum perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan. Selain itu berbagai jenis perpustakaan yang ada di masyarakat dapat dioptimalkan untuk menunjang pembelajaran bagi masyarakat dan bersinergi dengan perpustakaan umum dalam memberikan layanan informasi masyarakat.

### **C. Pengertian dan Fungsi Perpustakaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Adapun asas pelaksanaan perpustakaan adalah asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan

kemitraan, karena perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Pengertian lain menurut Sulisty-Basuki (1993:3), perpustakaan ialah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual.

Secara umum Tujuan perpustakaan adalah untuk menyediakan fasilitas dan sumber informasi serta menjadi pusat pembelajaran dan secara tidak langsung menciptakan masyarakat terdidik terpelajar, terbiasa membaca dan berbudaya tinggi (Sutarno, 2006:34). Dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut pendapat Sutarno (2006), setiap orang yang telah terbiasa membaca dan memanfaatkan sumber-sumber belajar dan terdidik secara mandiri, masuk ke perpustakaan berarti ingin membaca dan mendapatkan informasi. Bentuk dan jenis bacaan bagi setiap orang yang ke perpustakaan tidak sama, yang sama adalah kegiatannya yaitu membaca dan mempelajari sesuatu.

Secara umum perpustakaan mengemban beberapa fungsi yang sangat vital sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Menurut Darmono (2007) beberapa fungsi yang dianggap vital adalah sebagai berikut:

a. Fungsi informasi

Perpustakaan sekolah menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya agar masyarakat dapat:

- 1) mengambil berbagai ide dari buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu,
- 2) menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyerap informasi dalam berbagai bidang serta mempunyai kesempatan untuk dapat memilih informasi yang layak yang sesuai dengan kebutuhannya,
- 3) memperoleh kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi yang tersedia di perpustakaan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan,

- 4) memperoleh informasi yang tersedia di perpustakaan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat

b. Fungsi pendidikan

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya sebagai sarana untuk menerapkan tujuan pendidikan. Melalui fungsi ini manfaat yang diperoleh masyarakat adalah:

- 1) agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan sebagai bagian penting dari pendidikan sepanjang hayat,
- 2) untuk membangkitkan dan mengembangkan minat mempertinggi kreativitas dan kegiatan intelektual,
- 3) mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang demokratis.

c. Fungsi kebudayaan

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk:

- 1) meningkatkan mutu kehidupan dengan memanfaatkan berbagai informasi sebagai rekaman budaya bangsa untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan manusia baik secara individu maupun secara kelompok,
- 2) membangkitkan minat terhadap kesenian dan keindahan, yang merupakan salah satu kebutuhan manusia terhadap citarasa seni,
- 3) mendorong tumbuhnya kreativitas dalam berkesenian,
- 4) mengembangkan sikap dan sifat hubungan manusia yang positif serta menunjang kehidupan antar budaya secara harmonis,
- 5) e menumbuhkan budaya baca dimasyarakat.

d. Fungsi rekreasi

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya untuk:

- 1) menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani,
- 2) mengembangkan minat rekreasi melalui berbagai bacaan dan pemanfaatan waktu senggang,
- 3) menunjang berbagai kegiatan kreatif serta hiburan yang positif.



e. Fungsi penelitian

Sebagai fungsi penelitian perpustakaan menyediakan berbagai informasi untuk menunjang kegiatan penelitian. Informasi disajikan meliputi berbagai jenis dan bentuk informasi.

f. Fungsi deposit

Sebagai fungsi deposit perpustakaan berkewajiban menyimpan dan melestarikan semua karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di wilayah Indonesia. Perpustakaan yang menjalankan fungsi deposit secara nasional adalah Perpustakaan Nasional. Sebagai fungsi deposit Perpustakaan Nasional merupakan perpustakaan yang ditunjuk oleh UU No. 4 Tahun 1990 yaitu Undang-undang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Wilayah Republik Indonesia, atau karya cetak dan karya rekam tentang Indonesia yang diterbitkan di luar negeri, dan oleh lembaga atau importir diedarkan di wilayah Indonesia.

Terkait dengan fungsi deposit maka perpustakaan yang berada di daerah (Kota dan Kabupaten) perlu menyimpan dan melestarikan *local content* daerah, naskah kuno yang berada di daerah, serta juga melestarikan kearifan lokal daerah. Kearifan lokal tersebut merupakan ciri khas daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan (Darmono, 2013) haruslah mengacu kepada manajemen sistem layanan perpustakaan. Manajemen sistem layanan perpustakaan selalu mengutamakan 4 (empat) dasar pemberian layanan, yaitu:

- a. selalu berorientasi kepada kebutuhan pengguna layanan;
- b. layanan yang diberikan atas dasar keseragaman, keadilan, merata dan memandang pengguna perpustakaan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dipandang secara individual;
- c. layanan perpustakaan dilandasi dengan tata aturan yang jelas dan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi layanan. Peraturan perpustakaan harus di dukung oleh semua pihak agar layanan perpustakaan dapat berjalan dengan baik;
- d. layanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor kecepatan, ketepatan dan kemudahan dengan didukung oleh administrasi yang baik.

Secara umum sistim layanan perpustakaan ada 2 (dua) macam, yaitu layanan yang bersifat terbuka dan layanan yang bersifat tertutup. Pemilihan sistim layanan ditentukan dengan beberapa faktor pertimbangan, yaitu:

- a. tingkat keselamatan koleksi perpustakaan;
- b. jenis koleksi dan sifat rentan koleksi;
- c. perbandingan antara jumlah staf, jumlah pengguna dan jumlah koleksi;
- d. luas Gedung;
- e. rasio antara jam layanan dengan jumlah staf perpustakaan.

Dalam kegiatan operasionalnya, perpustakaan memberikan layanan kepada pemustaka. Menurut Sutarno (2006), unsur-unsur yang terdaat dan terkait dengan sistim layanan perpustakaan meliputi:

- a. kesiapan petugas layanan baik fisik, mental, kemampuan, ketrampilan, pengalaman dan kemauan;
- b. kesiapan peralatan, dan perlengkapan, kerja sama dan persamaan persepsi;
- c. peraturan dan tata tertib perpustakaan yang singkat, jelas, dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan serta dipatuhi oleh pemakai perpustakaan;
- d. pedoman yang standar di bidang layanan perpustakaan yang berlaku umum, sehingga dapat dipelajari untuk dipraktekkan.

Menurut standarisasi secara nasional jenis layanan yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan perpustakaan, yaitu:

- a. menyusun rencana operasional layanan;
- b. layanan informasi;
- c. layanan penelitian;
- d. layanan rekreasi;
- e. layanan sirkulasi;
- f. layanan referens;
- g. layanan penelusuran literatur;
- h. layanan bimbingan pemakai;
- i. layanan lain yang dibutuhkan masyarakat.

#### **D. Menumbuhkan Minat Membaca menuju Masyarakat Pembelajar**

Minat baca menurut Sudarsana (2010:1.51) merupakan salah satu dari aspek pembinaan dan pengembangan perpustakaan atau dengan kata lain perpustakaan menjadikan minat baca sebagai tujuan dan sasaran. Maka dapat dikatakan bahwa perpustakaan merupakan sarana atau tempat membaca yang bermanfaat untuk mengembangkan minat baca. Selanjutnya Sudarsana (2010:4.29) menjelaskan bahwa, penumbuhan dan pengembangan minat baca meliputi empat macam kegiatan, yaitu merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan menilai program penumbuhan dan pengembangan minat baca, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat terutama melalui perpustakaan. Selain itu, berdasarkan penelitian Ariningsih, dkk (2009) menurut pendapat masyarakat, cara meningkatkan minat dan kebiasaan membaca dapat dilakukan dengan:

- a. mendirikan perpustakaan sampai pada tingkat desa/kelurahan yang dekat dengan masyarakat,
- b. menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat usia dan melek huruf masyarakat,
- c. menyediakan layanan perpustakaan keliling yang aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jadwal yang pasti di tempat-tempat strategis,
- d. penyuluhan secara berkelanjutan dengan berbagai macam bentuk,
- e. menerapkan inovasi perpustakaan yang dapat membantu menumbuhkan minat dan kegemaran membaca masyarakat,
- f. perlunya perpustakaan menyediakan kemasan buku yang mudah dipahami oleh masyarakat terutama masyarakat dari kalangan yang mempunyai pendidikan rendah, dan
- g. diversifikasi layanan perpustakaan dengan berbasis pada teknologi informasi. Untuk itu pengembangan **perpustakaan digital** menjadi bagian penting dalam mengimbangi perilaku masyarakat modern dalam memperoleh dan menggunakan informasi dengan piranti modern dan canggih.

Pemerintah juga mempunyai peran penting dalam menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang gemar membaca. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan juga disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar

membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Pasal 48 menyebutkan bahwa pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Dalam masyarakat pembelajar yang terus tumbuh dan berkembang, perpustakaan mempunyai posisi yang strategis karena perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Dengan kata lain, perpustakaan merupakan wahana pembelajaran masyarakat. Arifin (2006), mengatakan bahwa dengan adanya perpustakaan tersedia fasilitas untuk melakukan kontak dengan para jenius di berbagai negara melalui buku. Di perpustakaan juga dapat dilakukan 'perantauan mental' ke berbagai macam pemikiran dengan 'perjalanan lewat bacaan. Hal itu karena –sebagaimana dikutip di atas– pada dasarnya bahan perpustakaan adalah rekaman ungkapan perasaan, gagasan, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, koleksi bahan perpustakaan dalam perpustakaan adalah sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat. Bahkan, Mittal (dalam Laksmi, 2007) menyebut perpustakaan sebagai pasar ide, atau Gerald E. Brogan dan Jeanne T. Buck (dalam Laksmi, 2007) menyebutnya sebagai supermarket akademik yang menjajakan buku-buku, majalah/jurnal, rekaman, slides, media pengajaran, karya seni, dan bahan-bahan lainnya. Tentunya harus dimengerti bahwa komoditi dalam supermarket akademik ini bukan untuk diperoleh dengan cara membeli atau menyewa.

#### **E. Pentingnya Perpustakaan Umum bagi Masyarakat Kota Malang**

Keberadaan perpustakaan menjadi keniscayaan dalam masyarakat yang berbudaya, baik sebagai titik tolak ataupun prasyarat terjadinya proses, maupun sebagai hasil atau wujud dari proses pembudayaan. Adalah kewajiban Pemerintah Kota Malang untuk membudayakan warganya, sekaligus mendukung peningkatan kebudayaan itu secara berkelanjutan; sehingga adalah juga kewajiban Pemerintah Kota Malang untuk menjamin adanya perpustakaan. Hal ini antara lain dapat diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur perpustakaan.

Ditengah arus globalisasi yang tidak bisa kita bendung, keberadaan perpustakaan merupakan keniscayaan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat Kota Malang yang literat.

Masyarakat yang literat adalah masyarakat yang sadar tentang pentingnya arti informasi, menghargai informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Mau melakukan dan menghargai kegiatan membaca sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dengan penuh rasa tanggung jawab. Masyarakat yang mau melakukan **gerakan literasi** sebagai upaya untuk menumbuhkan iklim yang kondusif untuk membudayaan kegemaran membaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar (2006). *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Darmono. 2013. *Manajemen Perpustakaan*. Malang: Bayu Media bekerjasama dengan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.
- Darmono. 2016. *Peran Perpustakaan dalam Pengentasan kemiskinan Informasi*. Jurnal FKP2TN Vo. 1 No. 2 Tahun 2006.
- Giddens, Anthony. (1984). *The Constitution of Society*, Berkeley: University of California Press.
- Habermas, Jurgen. 1991. *The Structural Transformation of the Public Sphere*, translated by William Rehg. Cambridge, Mass.: MIT Press
- Indonesia. Undang-Undang. 2007. *Undang-undang No 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan*.
- Laksmi. 2007. *Tinjauan Kulutural Terhadap Perpustakaan: Inspirasi dari Sebuah Karya Umberto Eco*. Jakarta; Sagung Seto
- Sudarsana, Blasius. 2010. *Pustakawan Cinta dan Teknologi*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi
- Sulistyo-Basuki. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia
- Sutarno. 2006. *Manajemen Perpustakaan; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Sagung Seto